

## Bab 6

# INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

### A. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan pada amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta misi dan visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa menetapkan kondisi idaman yang dirumuskan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan jangka menengah (tahun 2009-2014) sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Strategis

Tujuan pembangunan pendidikan adalah keadaan atau hasil akhir yang akan dicapai atau diwujudkan pada tahun 2014 sesuai fokus prioritas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Tujuan tersebut meliputi:

- a. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Mutu Pendidik;
- b. Mewujudkan fasilitasi hasil karya cipta pendidikan tinggi.

#### 2. Sasaran Strategis

Sasaran yang dimaksud adalah merupakan kondisi idaman yang akan dicapai pada akhir tahun 2014, melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta didukung dengan pengalokasian anggaran yang memadai. Kondisi idaman yang akan dicapai tersebut meliputi:

- a. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa;
- b. Menurunnya buta aksara penduduk diatas usia 15 tahun;
- c. Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Terwujudnya fasilitasi hasil karya cipta pendidikan tinggi.

Adapun target yang hendak diwujudkan pada tahun 2014 berdasarkan program pendidikan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- a. PAUD (termasuk pendidikan bagi anak berkelainan) dengan APK Nasional mencapai 72%, APK Provinsi minimal 60%, APK Kota minimal 90%, dan APK Kabupaten minimal 50%, 80% di kabupaten dan 100% di kota guru TK/TKLB berkualifikasi minimal S1/D4 dan bersertifikat.
- b. Pendidikan Dasar Universal
  - 1) Tingkat literasi nasional usia  $\geq 15$  tahun mencapai 97%, tingkat literasi provinsi minimal 92%;

- 2) APM SD/MI/ sederajat nasional mencapai 97%, APM provinsi minimal 93% APM kota minimal 98%, dan APM kabupaten minimal 85%;
- 3) APK SMP/MTs/ sederajat nasional mencapai 97%, APK provinsi minimal 105%, APK kota minimal 105%, dan APK kabupaten minimal 80%.
- 4) Angka putus sekolah SD maksimal 0,7% dan SMP maksimal 1%, angka melanjutkan SD/ sederajat ke SMP/ sederajat lebih dari 99%;
- 5) 100% SMP memiliki perpustakaan;
- 6) Hasil ujian nasional SMP mencapai 7,25;
- 7) 95% SD dan 50% SMP memenuhi SNP dengan akreditasi minimal B. sedangkan pada pendidikan luar biasa 40% SDLB dan 40% SMPLB memenuhi SNP dengan akreditasi minimal B;
- 8) Semua kabupaten/kota memiliki minimal satu masing-masing SDLB dan SMPLB dengan pelayanan baik, di samping itu setiap kabupaten/kota terdapat minimal satu sekolah reguler (pada semua jenjang SD dan SMP) yang menyelenggarakan pendidikan inklusif;
- 9) Semua kota memiliki minimal satu SD dan satu SMP SBI atau rintisan SBI, 95% kab. memiliki minimal satu SD dan satu SMP SBI atau rintisan SBI;
- 10) 50% peserta didik SD memiliki kompetensi literasi komputer dan 15% peserta didik SDLB memiliki kompetensi literasi komputer;
- 11) 80% SMP dan 50% SMPLB memiliki laboratorium lengkap (IPA dan Bahasa) termasuk laboratorium multimedia yang tersambung ke internet dan menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK;
- 12) 60% SMP menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK;
- 13) 75% di kabupaten dan 95% di kota-kota guru SD/SDLB dan 99% Guru SMP/SMP/LB berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat;
- 14) 70% Guru SD/SDLB memiliki kompetensi literasi komputer;
- 15) 80% Guru SMP/SMPLB kompeten memfasilitasi pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK;
- 16) Pendidikan Wajib Belajar 9 tahun di semua SD/SDLB dan SMP/SMPLB Negeri berstandar pelayanan minimal sampai dengan berstandar nasional diselenggarakan tanpa memungut biaya operasi sekolah dan yang melanggar disanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di SD/SDLB dan SMP/SMPLB swasta yang mendapatkan subsidi BOS tidak lagi memungut biaya operasional sekolah yang memberatkan peserta didik;
- 17) Mengembangkan pendidikan keterampilan khusus bagi siswa berkebutuhan khusus. 75% siswa lulusan SDLB atau SMPLB menguasai minimal satu dasar-dasar keterampilan khusus;
- 18) Meningkatkan apresiasi siswa terhadap keberagaman dan perkembangan seni budaya.

c. Pendidikan Menengah Bermutu dengan ciri:

- 1) APK nasional melampaui 85%, APK Provinsi Jawa Timur minimal 95%, APK kota minimal 95%, dan APK kabupaten minimal 85%;
- 2) Rasio peserta didik SMA:SMK = 33:67;
- 3) 90% SMA memenuhi SNP dengan akreditasi Minimal B, 75% SMK memenuhi SNP dengan akreditasi minimal B dan 50% SMALB memenuhi SNP dengan akreditasi minimal B;
- 4) Semua kabupaten dan kota minimal memiliki 1 SMA dan 1 SMK SBI atau RSBI;
- 5) Semua kabupaten/kota memiliki minimal satu SMALB dengan pelayanan baik, di samping itu setiap kabupaten/kota terdapat minimal satu sekolah reguler (pada jenjang SMA/SMK) yang menyelenggarakan pendidikan inklusif;
- 6) Semua SMA dan SMK serta 70% SMALB memiliki laboratorium lengkap termasuk laboratorium multimedia yang tersambung ke internet dan menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK;
- 7) Semua guru SMA dan SMK berkualifikasi S1/D4, bersertifikat, dan kompeten memfasilitasi pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK;
- 8) 75% lulusan SMA diterima di perguruan tinggi pada tahun kelulusan, dan 70% lulusan SMK bekerja di sektor formal pada tahun kelulusan;
- 9) 95% peserta didik putus sekolah di kota dan 80% di kabupaten (termasuk dari pendidikan luar biasa) mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan dan/atau pelatihan kecakapan hidup bersertifikat disertai layanan penempatan kerja;
- 10) Pendidikan menengah di semua SMA dan SMK berstandar pelayanan minimal sampai dengan berstandar nasional diselenggarakan dengan pungutan yang terjangkau oleh peserta didik;
- 11) 75% SMA dan SMK SSN dan seluruh SMA dan SMK RSBI/SBI bersertifikat ISO 9001:2000;
- 12) Mengembangkan pendidikan keterampilan khusus bagi siswa berkebutuhan khusus. 75% siswa lulusan SMALB menguasai minimal satu keterampilan khusus;

d. Pendidikan Non Formal dan Informal

- 1) 95% peserta didik di kota dan 85% di kabupaten yang putus sekolah mendapatkan layanan Pendidikan Non formal berbasis Pendidikan Kecakapan Hidup bersertifikasi disertai penempatan kerja;
- 2) 90% SKB memenuhi SNP dengan akreditasi minimal B, 30% PKBM memenuhi SNP dengan akreditasi minimal B, dengan 15% LPK (Lembaga Penyelenggara Kursus) memenuhi SNP dengan akreditasi B;

- 3) Semua kabupaten/kota seluruh Indonesia memiliki SKB dan minimal 10 PKBM;
  - 4) Minimal 8 juta orang terlayani pendidikannya melalui kursus dan pelatihan berbasis PKH di LPK;
  - 5) Minimal 30 LPK dapat masuk jajaran LPK berskala internasional;
  - 6) 75% pamong belajar SKB sudah  $S_2$ , dan 75% pamong belajar di P2PNFI sudah  $S_2$ ;
  - 7) Minimal 50% peserta kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikasi kompetensi.
- e. Penguatan Sinergi Lintas Unit Utama
- 1) Rerata tertimbang APK gabungan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi mencapai minimal 75%;
  - 2) Nilai total tertimbang medali emas, perak, dan perunggu yang diperoleh Indonesia dalam kompetisi berskala internasional meningkat secara signifikan;
  - 3) Opini BPK RI atas laporan keuangan Depdiknas berkategori Wajar Tanpa Pengecualian selama minimal 4 tahun berturut-turut;
  - 4) Semua satker eselon II mempraktikkan *service excellence* bersertifikasi ISO 9001:2000;
  - 5) Manajemen berbasis kinerja diterapkan sampai dengan Pejabat Eselon IV
  - 6) Kualitas LAKIP Depdiknas menurut penilaian MenPAN minimal pada peringkat 3 untuk sekurang-kurangnya 4 tahun dari 5 tahun masa kerja kabinet;
  - 7) Tingkat absensi pegawai selama 5 tahun terakhir tidak pernah melebihi 0,01%;
  - 8) Semua satuan kerja terkoneksi secara *online*;
  - 9) e-administrasi diterapkan oleh semua satuan kerja;
  - 10) Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang inklusif diterapkan secara terintegrasi dan komprehensif sejak SD sampai dengan Pendidikan Tinggi, baik melalui jalur Formal dan Nonformal;

## B. Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Indikator kinerja yang digunakan memiliki kriteria yang berlaku spesifik, jelas, relevan, dapat dicapai, dapat diukur secara obyektif serta fleksibel terhadap perubahan/penyesuaian.

Mengingat bidang pendidikan mempunyai program pembangunan pendidikan yang beragam, maka indikator kinerja yang diukur dapat bersifat fisik (misalnya: pembangunan prasarana dan sarana fisik, angka partisipasi siswa, angka mengulang kelas, dan angka putus sekolah) maupun nonfisik, misalnya kecerdasan dan perilaku peserta didik. Berdasarkan sifat dari masing-masing jenis indikator kinerja maka diperlukan cara dan alat ukur yang berbeda sesuai dengan sifat dan bentuk indikator

yang akan diukur. Oleh sebab itu, indikator kinerja yang digunakan harus memiliki kriteria seleksi yang dapat mengukur capaian dan dampak secara komprehensif, memiliki validitas konstruk dan isi yang tinggi, sederhana dan mudah diukur serta memacu pimpinan berperilaku positif.

Program dan/atau kegiatan pendidikan yang baik memiliki lima kriteria yang bisa disingkat dengan SMART (*specific, measurable, achievable, realistic, timebound*). Kriteria tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan indikator kinerja pendidikan yang terukur dan yang dapat dicapai sebagai target/sasaran masing-masing program. Secara umum, terdapat empat jenis indikator kinerja yang biasa digunakan sebagai acuan dalam pemantauan dan evaluasi atau pengukuran kinerja organisasi, yaitu:

1. Indikator masukan, antara lain mencakup guru, kurikulum, siswa, dana, sarana dan prasarana belajar (buku, laboratorium, dll), data dan informasi, pendidik dan tenaga kependidikan, gedung sekolah, kelompok belajar, sumber belajar, motivasi belajar, kesiapan anak (fisik dan mental) dalam belajar, kebijakan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
2. Indikator proses, antara lain mencakup lama waktu belajar, kesempatan mengikuti pembelajaran, lama mengikuti pendidikan, jumlah yang putus sekolah, efektivitas pembelajaran, mutu proses pembelajaran, aktivitas guru dan siswa, sistem evaluasi hasil belajar, dan metode pembelajaran yang digunakan.
3. Indikator keluaran, antara lain mencakup jumlah siswa yang lulus atau naik kelas, nilai-rata-rata ujian, kemampuan siswa dalam berbahasa asing/Inggris dan penggunaan komputer, mutu lulusan yang naik kelas, dan jumlah siswa yang menyelesaikan pembelajaran/naik kelas, jumlah siswa yang mengulang, jumlah siswa putus sekolah berdasarkan jenis kelamin.
4. Indikator dampak, yang antara lain berupa kemampuan/jumlah siswa yang melanjutkan sekolah, jumlah siswa yang bisa bekerja di dunia usaha-industri/perusahaan atau usaha mandiri, jumlah angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan, lama waktu memperoleh pekerjaan, gaji pertama yang diterima, dan pengaruh para lulusan terhadap mutu angkatan kerja/lingkungan sosial, peran serta siswa dalam pembangunan lingkungan dan pengaruh atau peran lulusan pendidikan dan pelatihan terhadap kehidupan masyarakat secara luas.

Selain itu, pemantauan dan evaluasi peran lulusan pendidikan dan pelatihan terhadap kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan terhadap kinerja satuan organisasi pengelola dan penyelenggara pendidikan yaitu mencakup aspek teknis, administrasi dan pengelolaan kegiatan dan/atau program pendidikan tersebut. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada hakikatnya untuk mengukur kesesuaian pencapaian indikator kinerja atau target kerja yang ditetapkan dalam rencana jangka menengah, dengan target yang dapat dicapai melalui strategi pelaksanaan tertentu.

Indikator kinerja yang diukur dalam pemantauan dan evaluasi diklasifikasi berdasarkan sasaran strategis dan dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Utama untuk Mengukur Keberhasilan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
-1	-2	-3
1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan mutu pendidik	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APK PAUD (3-6 tahun)</li> <li>2. Rasio jumlah pendidik dengan Peserta Didik PAUD</li> <li>3. Angka Partisipasi Kasar (APK) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SD/MI/SDLB/Paket A</li> <li>- SMP/MTs/SMPLB/Paket B</li> </ul> </li> <li>4. Angka Partisipasi Murni (APM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SD/MI/SDLB/Paket A</li> <li>- SMP/MTs/SMPLB/Paket B</li> </ul> </li> <li>5. Angka Putus Sekolah <ul style="list-style-type: none"> <li>- SD/MI</li> <li>- SMP/MTs</li> </ul> </li> <li>6. Angka Mengulang <ul style="list-style-type: none"> <li>- SD/MI</li> <li>- SMP/MTs</li> </ul> </li> <li>7. Angka Kelulusan <ul style="list-style-type: none"> <li>- SD/MI</li> <li>- SMP/MTs</li> </ul> </li> <li>8. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs</li> <li>9. Rasio siswa/kelas <ul style="list-style-type: none"> <li>- SD/MI</li> <li>- SMP/MTs</li> </ul> </li> <li>10. Rasio siswa/guru <ul style="list-style-type: none"> <li>- SD/MI</li> <li>- SMP/MTs</li> </ul> </li> <li>11. Jumlah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SD/MI</li> <li>- SMP/MTs</li> </ul> </li> <li>12. Persentase peningkatan sekolah yang menerapkan pendidikan seni <ul style="list-style-type: none"> <li>- SD/MI</li> <li>- SMP/MTs</li> </ul> </li> <li>13. Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C</li> <li>14. Angka Partisipasi Murni (APM)</li> </ol>

		<p>jenjang SMA/MA/SMK/ SMALB/Paket C</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. Angka Putus Sekolah jenjang SMA/MA</li> <li>16. Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK</li> <li>17. Angka Mengulang jenjang SMA/MA/SMK</li> <li>18. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA</li> <li>19. Rasio jumlah siswa SMA:SMK</li> <li>20. Rasio siswa/kelas (SMA/SMK)</li> <li>21. Rasio siswa/guru SMA/SMK</li> <li>22. Jumlah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) jenjang SMA/SMK</li> <li>23. Persentase peningkatan sekolah jenjang SMA/MA/SMK yang menerapkan pendidikan seni</li> <li>24. Persentase sekolah berakreditasi</li> <li>25. Persentase penduduk miskin yang bisa bersekolah</li> <li>26. Jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi</li> </ol>
	Menurunnya secara berarti buta aksara penduduk di atas usia 15 tahun	Angka Melek Huruf usia di atas 15 tahun
	Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Pendidik &amp; tenaga kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1/D4</li> <li>2. Persentase Pendidik &amp; tenaga kependidikan bersertifikat profesi</li> </ol>
2. Mewujudkan fasilitasi hasil karya cipta pendidikan tinggi	Terwujudnya fasilitasi hasil karya cipta pendidikan tinggi	Jumlah hasil karya cipta mahasiswa yang dihasilkan